



Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Roadmap Pengendalian Inflasi 2019-2021



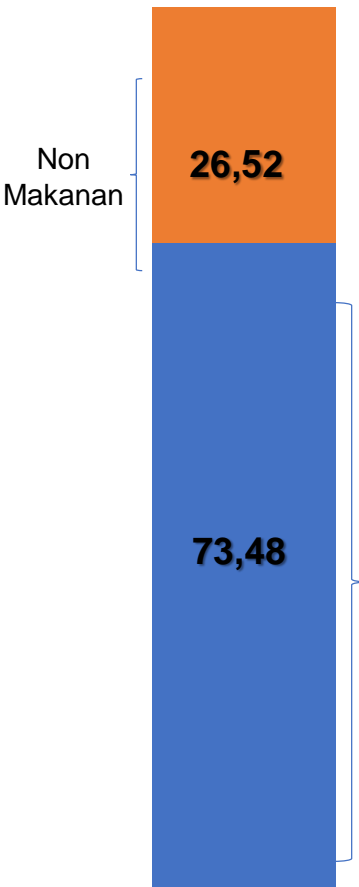
Oleh:
Dr. Iskandar Simorangkir SE. MA
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
TPIP
Jakarta, Oktober 2018



DAMPAK KENAIKAN HARGA TERHADAP KEMISKINAN

Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikan harga, khususnya harga kelompok makanan. Secara nasional kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,48 %

Pengeluaran RT Miskin



Kenaikan Harga Beras	Perubahan Jumlah Penduduk Miskin
10%	330.031
20%	660.062
30%	990.093
40%	1.320.123

- 1) Peningkatan harga beras sebesar 10% berpotensi meningkatkan:
 - Inflasi sebesar 0,9% (langsung dan tidak langsung)
 - Angka kemiskinan sekitar 1,3%
- 2) Diasumsikan pertumbuhan pengeluaran per kapita riil 5%

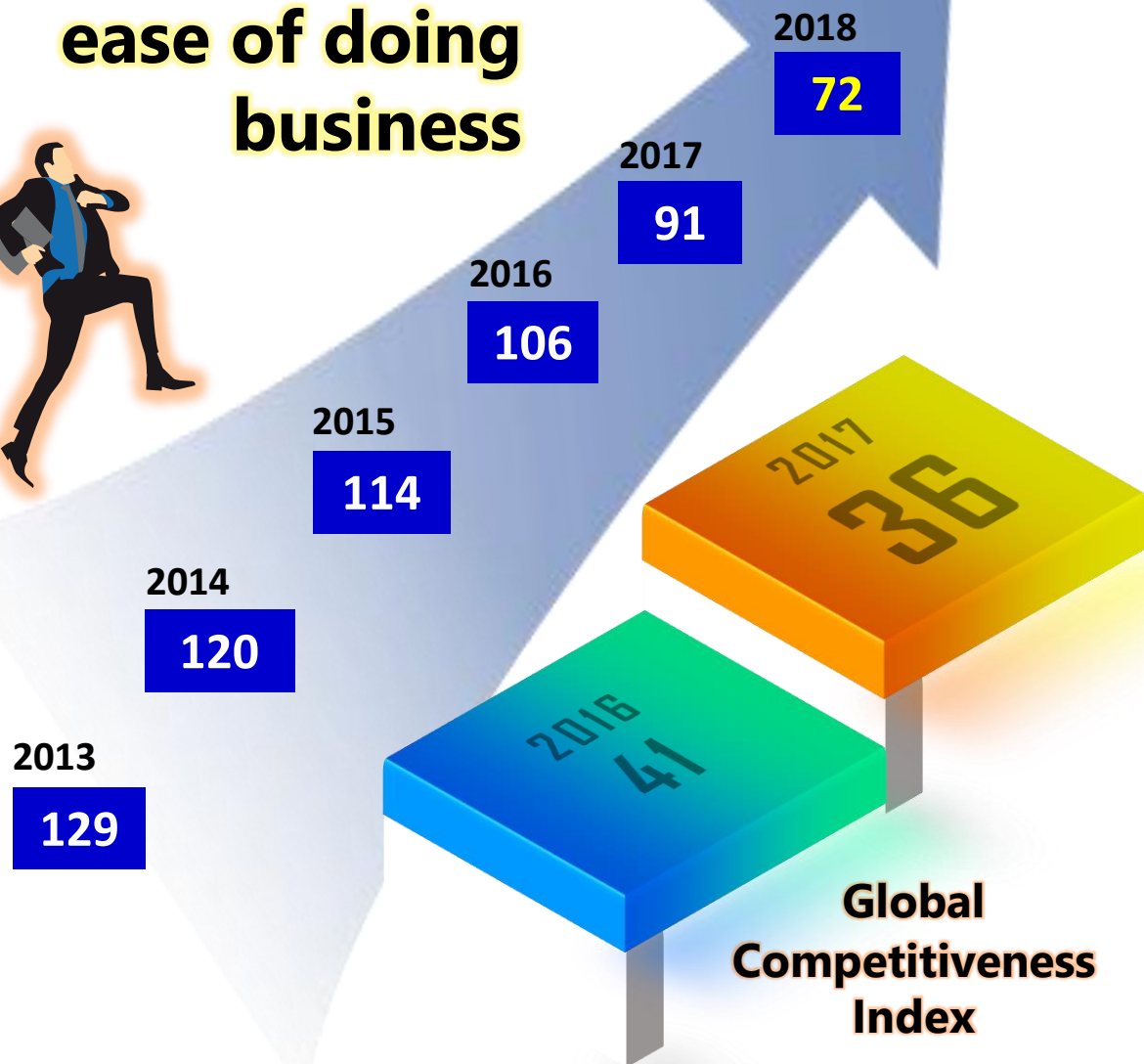


No	Komoditas	Kontribusi terhadap Garis Kemiskinan Maret 2018 (%)	
		Desa	Kota
1	Beras	26,79	20,95
2	Rokok kretek filter	10,21	11,07
3	Telur ayam ras	3,28	4,09
4	Gula pasir	3,07	2,24
5	Mie instan	2,21	2,43
6	Daging ayam ras	2,08	3,55
7	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,93	1,88
8	Bawang merah	1,81	1,50
9	Roti	1,80	1,65
10	Kue basah	1,77	1,78
11	Tempe	1,63	1,74

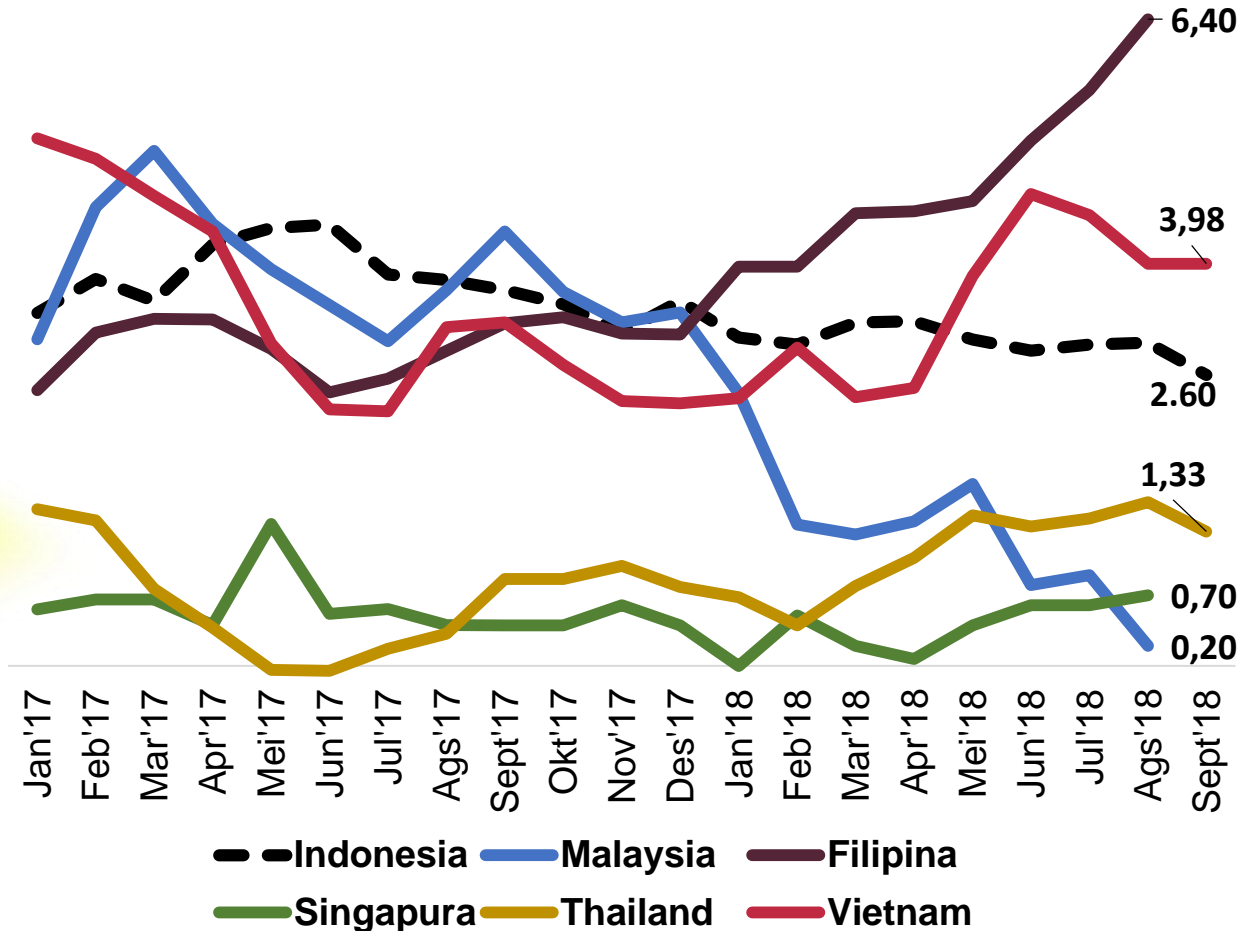


INFLASI RENDAH & STABIL: MENDUKUNG DAYA SAING NASIONAL

ease of doing business



Perbandingan Inflasi Indonesia serta Beberapa Negara di tahun 2018 (%YoY)



Sumber: tradingeconomics, CEIC (2018)

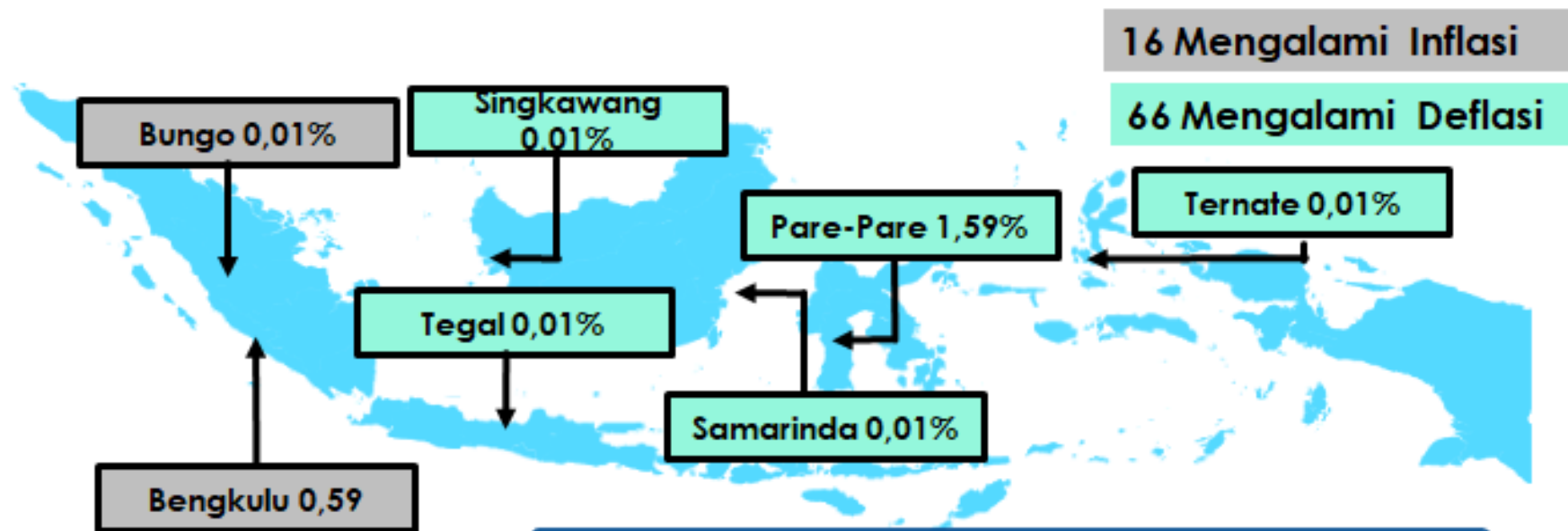
RISIKO INFLASI



GAMBARAN UMUM INFLASI SEPTEMBER 2018

Inflasi IHK

-0,18 % (M1M)
2,88 % (YoY)
1,94 % (YTD)



Berdasarkan Komponen

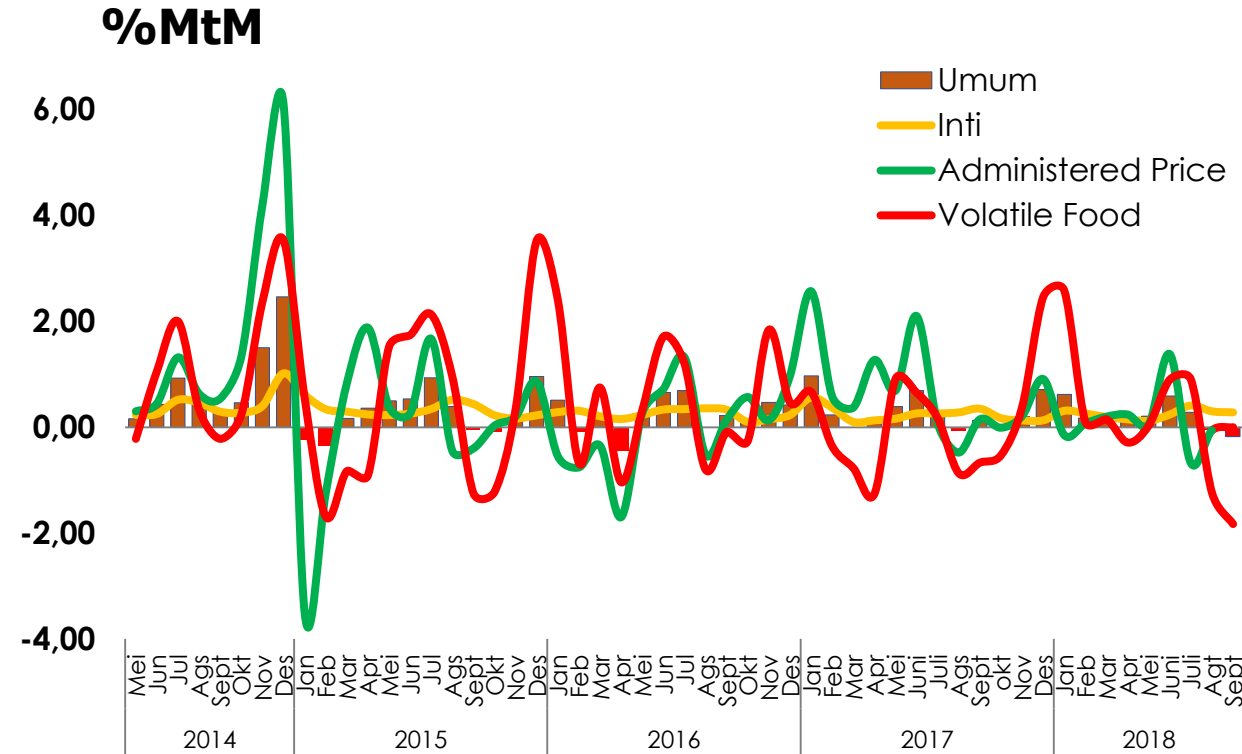
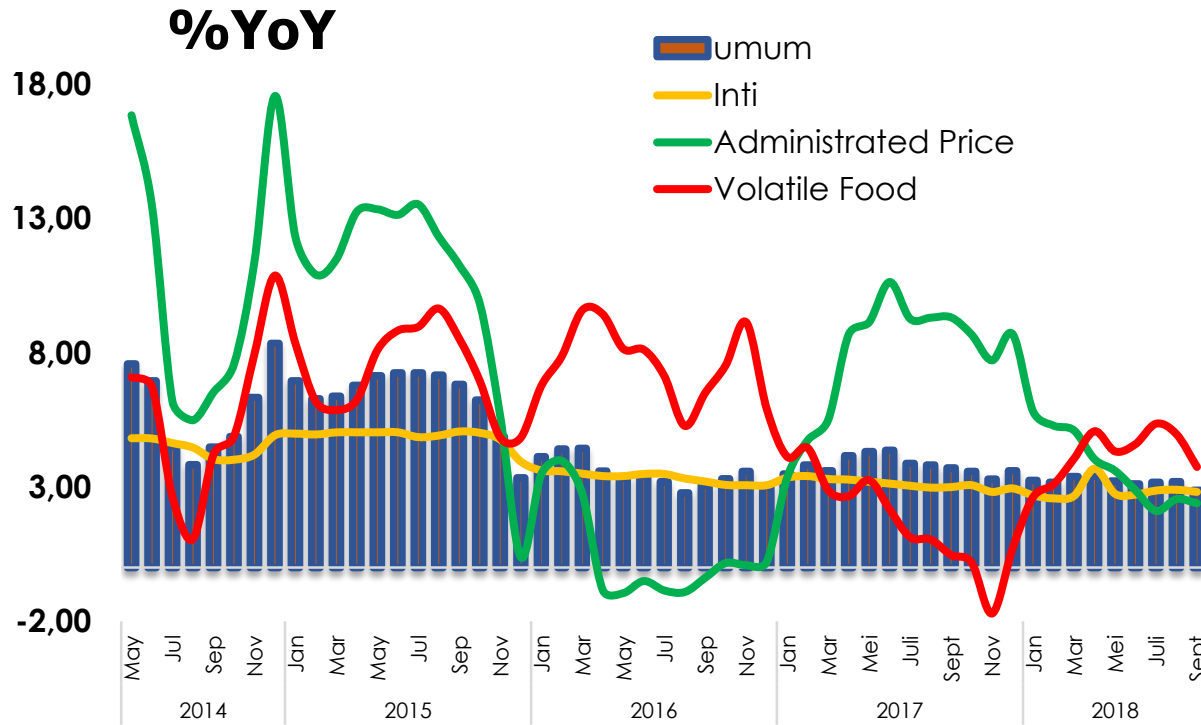
CORE	ADMINISTERED PRICE	VOLATILE FOOD
0,28% (M1M)	0,00% (M1M)	-1,83% (M1M)
2,82% (YoY)	2,40% (YoY)	3,75% (YoY)
2,38% (YTD)	1,27% (YTD)	1,41% (YTD)

Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Bahan Makanan -1,62% (M1M) 3,75% (YoY)	Makanan Jadi, Rokok, Minuman & Tembakau 0,29% (M1M) 1,04% (YoY)	Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar 0,21% (M1M) 2,11% (YoY)
Sandang 0,27% (M1M) 3,15% (YoY)	Kesehatan 0,41% (M1M) 3,18% (YoY)	Pendidikan, Rekreasi & Olahraga 0,54% (M1M) 3,25% (YoY)
Transpor, Komunikasi, & Jasa Keuangan -0,05% (M1M) 1,74% (YoY)		



PERKEMBANGAN INFLASI



Sumber: BPS

Inflasi headline 2014-2018 (% mtm)

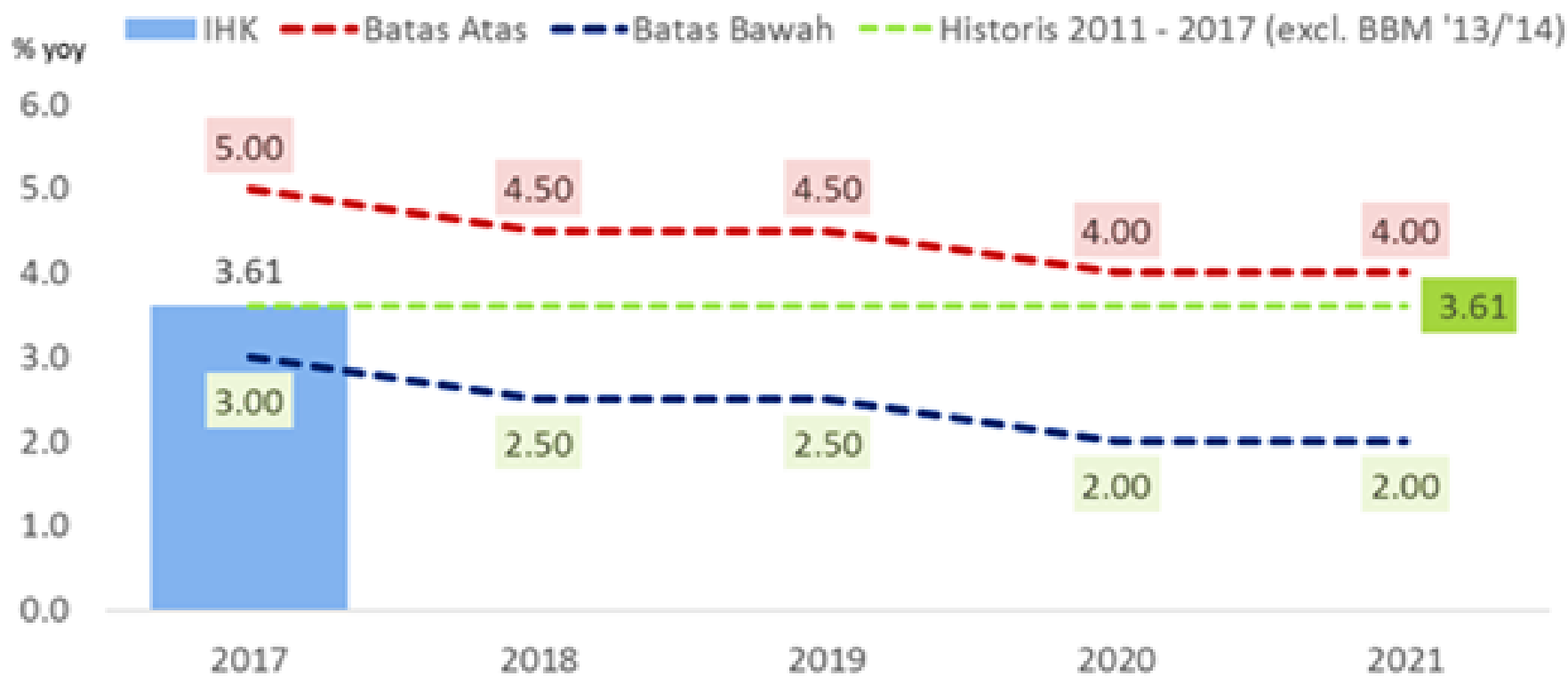
%mtm	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2014	1,07	0,26	0,08	-0,02	0,16	0,43	0,93	0,47	0,27	0,47	1,50	2,46
2015	-0,24	-0,23	0,17	0,36	0,50	0,54	0,93	0,39	-0,05	-0,88	0,21	0,96
2016	0,51	-0,09	0,19	-0,45	0,24	0,66	0,69	-0,02	0,22	0,14	0,47	0,42
2017	0,97	-0,02	-0,02	0,09	0,39	0,69	0,22	-0,07	0,13	0,01	0,21	0,71
2018	0,62	0,17	0,20	0,10	0,21	0,59	0,28	-0,05	-0,18			



SASARAN INFLASI IHK 2019 – 2021

Sasaran inflasi 2019-2021 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, masing-masing sebesar 3,5%±1%, 3,0% ±1% dan 3,0% ±1%.

Sasaran inflasi IHK (% yoy)

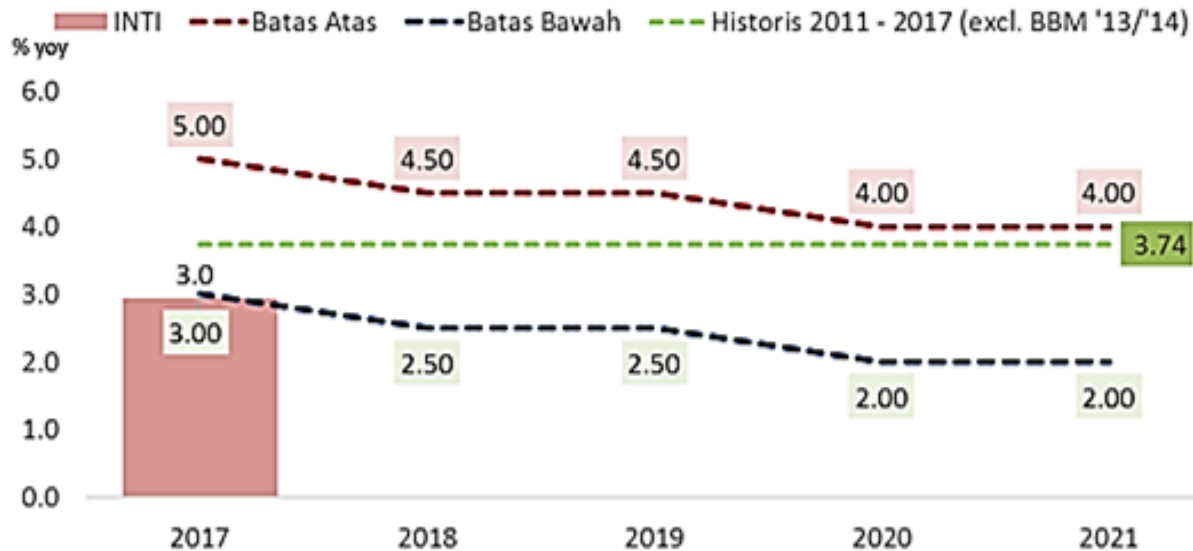




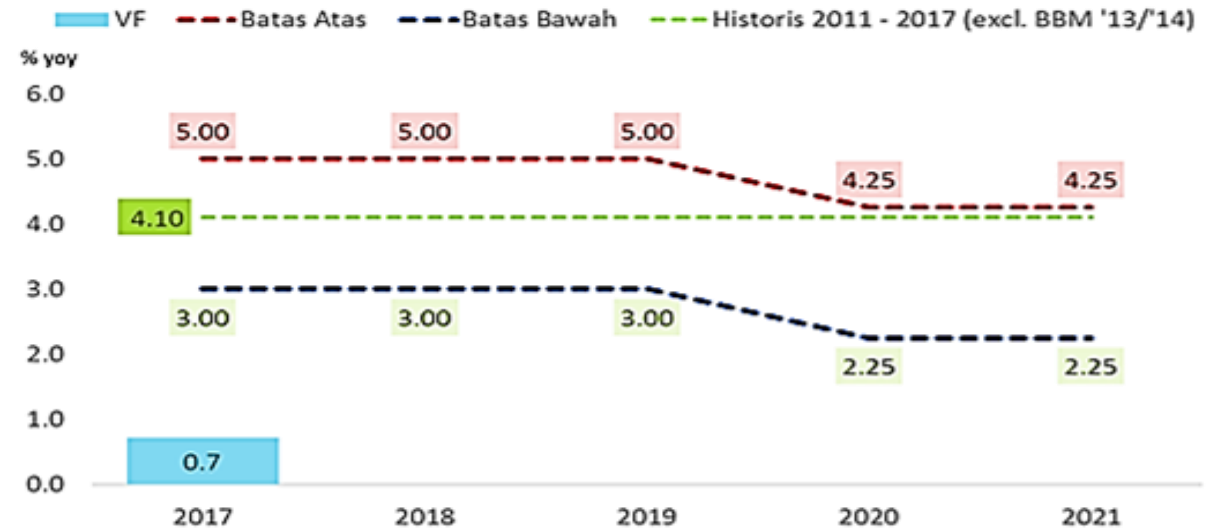
SASARAN INFLASI 2019 – 2021 BERDASAR KOMPONEN

Agar inflasi IHK tercapai sesuai sasarannya, **inflasi inti, VF dan AP** masing2 harus mencapai sekitar **3,5%±1%, 4,0%±1% dan 3,0%±1%** pada tahun **2019** serta **3%±1%, 3,25%±1%** dan **2,75%±1%** pada tahun **2020-2021**.

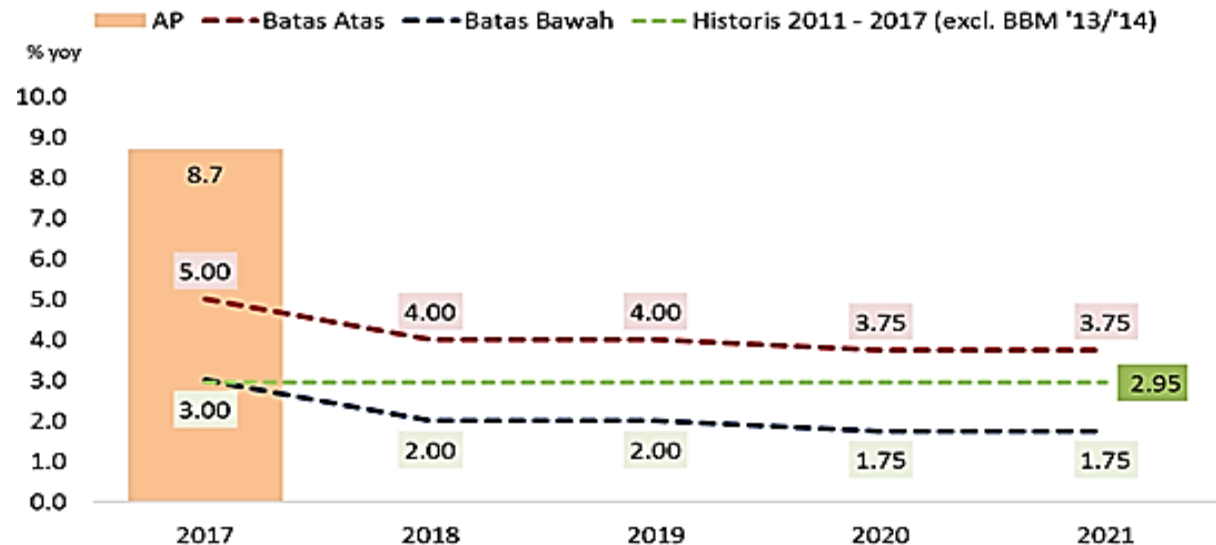
Sasaran inflasi Inti (% yoy)



Sasaran inflasi VF (% yoy)



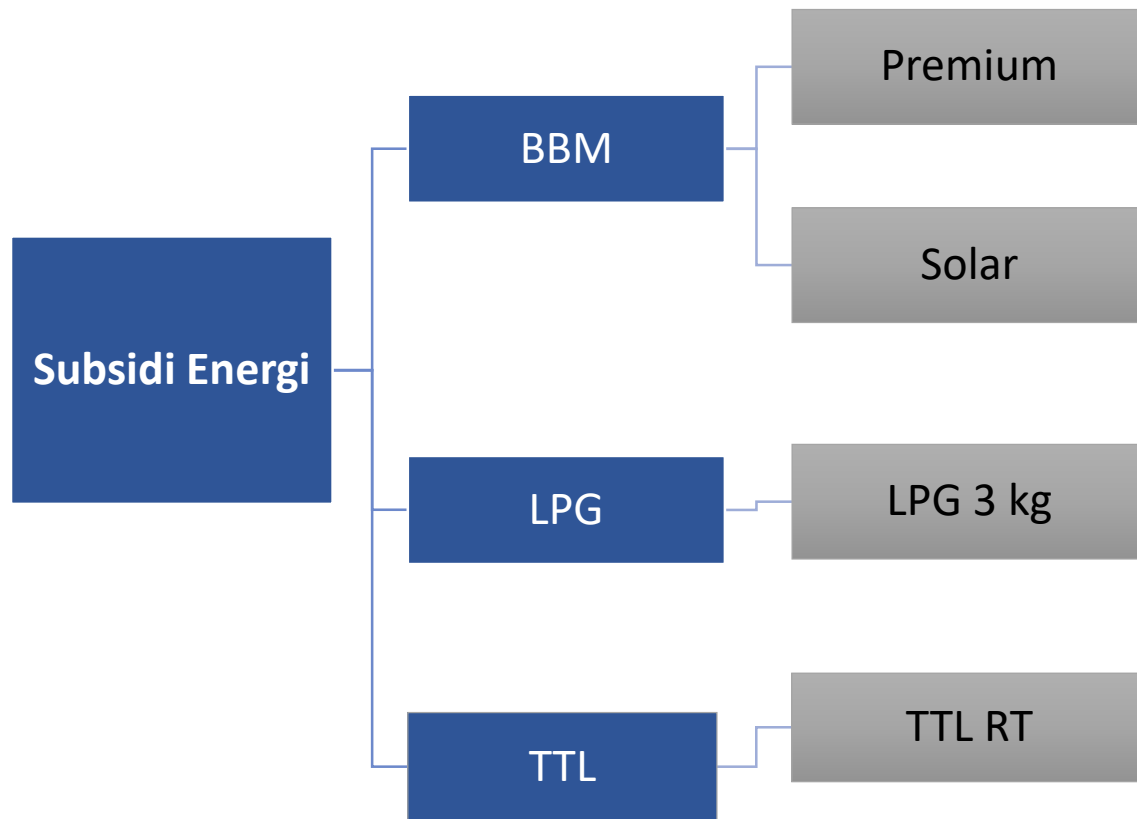
Sasaran inflasi AP (% yoy)





RISIKO INFLASI 2020-2021

Pelaksanaan roadmap terkait reformasi subsidi energi yang tepat sasaran belum optimal dalam rangka menjaga daya beli masyarakat



Kebijakan	Implementasi
<i>Market price</i> sejak 1 Januari 2015	Tidak ada perubahan harga sejak 1 April 2016
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Market price</i> dengan <i>fixed</i> subsidi Rp1000/l sejak 1 Januari 2015 ▪ <i>Market price</i> dengan <i>fixed</i> subsidi Rp500/l sejak 1 Juli 2016 	Tidak ada perubahan harga sejak 1 April 2016 dengan <i>fixed</i> subsidi Rp500/l sejak 1 Juli 2016
<i>Fixed price</i> dengan <i>floating</i> subsidi sejak 2007	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Tariff adjustment</i> untuk daya 1300VA ke atas sejak 2014 ▪ Subsidi tepat sasaran untuk daya 900VA sejak Januari 2017 	Tidak ada <i>tariff adjustment</i> sejak Januari 2017 untuk daya 1300VA ke atas dan sejak Juli 2017 untuk daya 900VA non subsidi

LATAR BELAKANG



KENAPA PERLU ROADMAP?

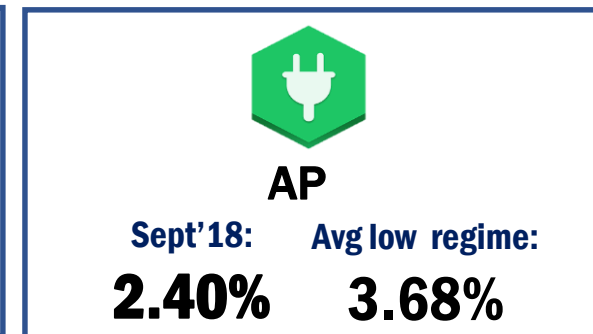
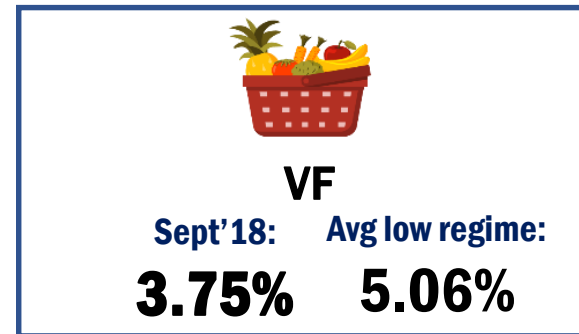
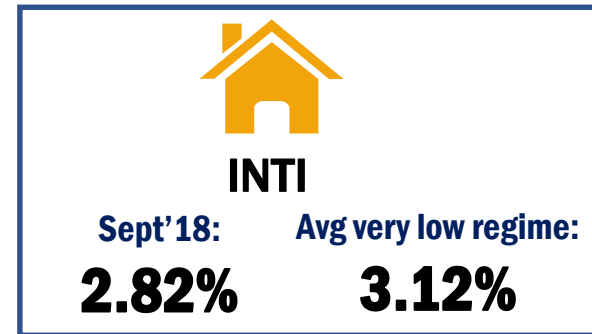
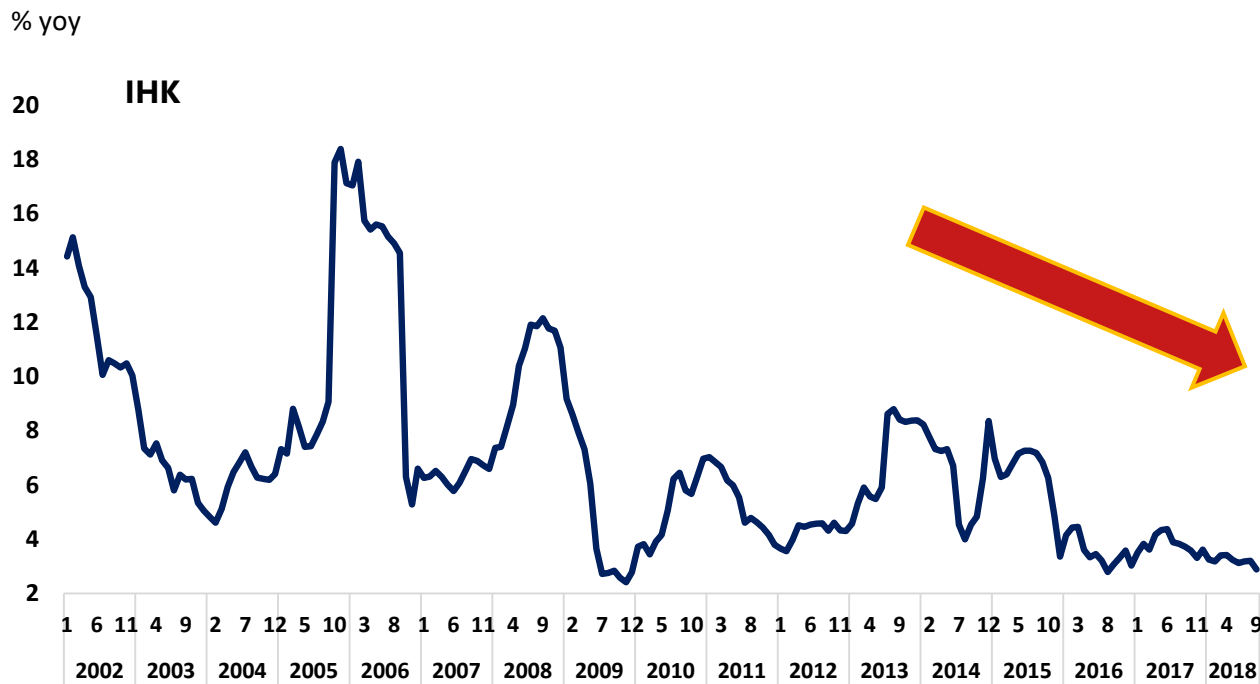
1. Menindaklanjuti amanat dalam Kepmenko 148/2017 tentang Tugas dan Keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat TPIP pasal 2 ayat (1), bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Pusat menyusun peta jalan pengendalian inflasi nasional sebagai rekomendasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah.
3. Mensinkronkan program kerja masing-masing dinas yang terkait pengendalian inflasi baik secara jangka menengah maupun jangka panjang.
4. Memudahkan penyelesaian masalah terkait pengendalian inflasi sampai ke tingkat daerah secara efektif
5. Mendorong daerah untuk membuat inovasi program



INFLASI DALAM TREN MENURUN (1)

Secara umum disagregasi inflasi mengalami tren menurun.

- Inflasi inti berada pada rezim terendah dan terus melambat sejak akhir 2015. Pada Januari 2016 – Mei 2018, rata-rata inflasi inti mencapai 3,17% (yoy), lebih rendah dari rata-rata jangka panjang (5,28%, yoy).
- Inflasi VF dan AP juga berada dalam rezim rendah dengan rata-rata sebesar 5,12% (yoy) dan 3,66% (yoy).

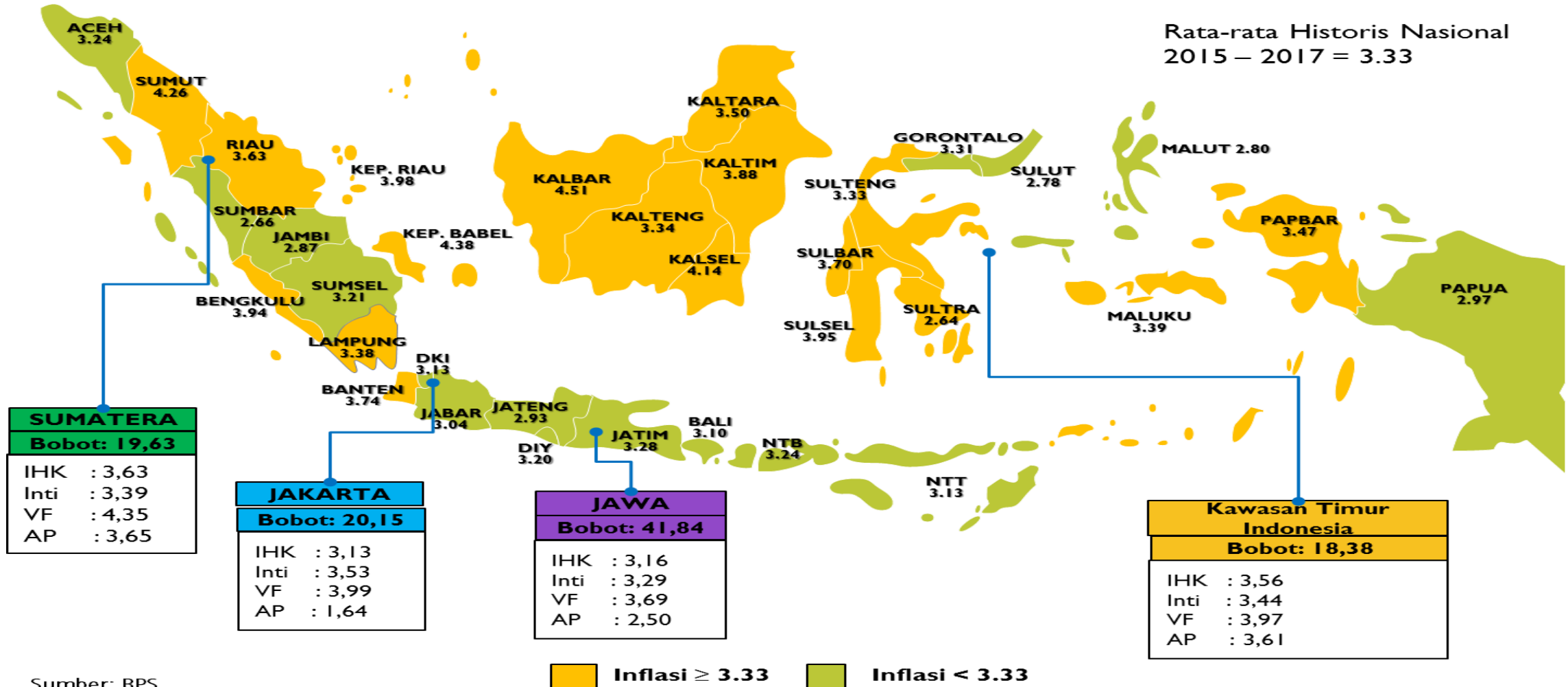




INFLASI DALAM TREN MENURUN (2)

- Secara umum inflasi di daerah dalam 3 tahun terakhir sesuai dengan sasaran inflasi nasional.
- Beberapa daerah mencatat inflasi di sekitar batas atas sasaran inflasi (5%), yaitu Sumatera Utara dan Kalimantan Barat

Historis Inflasi Daerah 2015 – 2017 (% yoy)



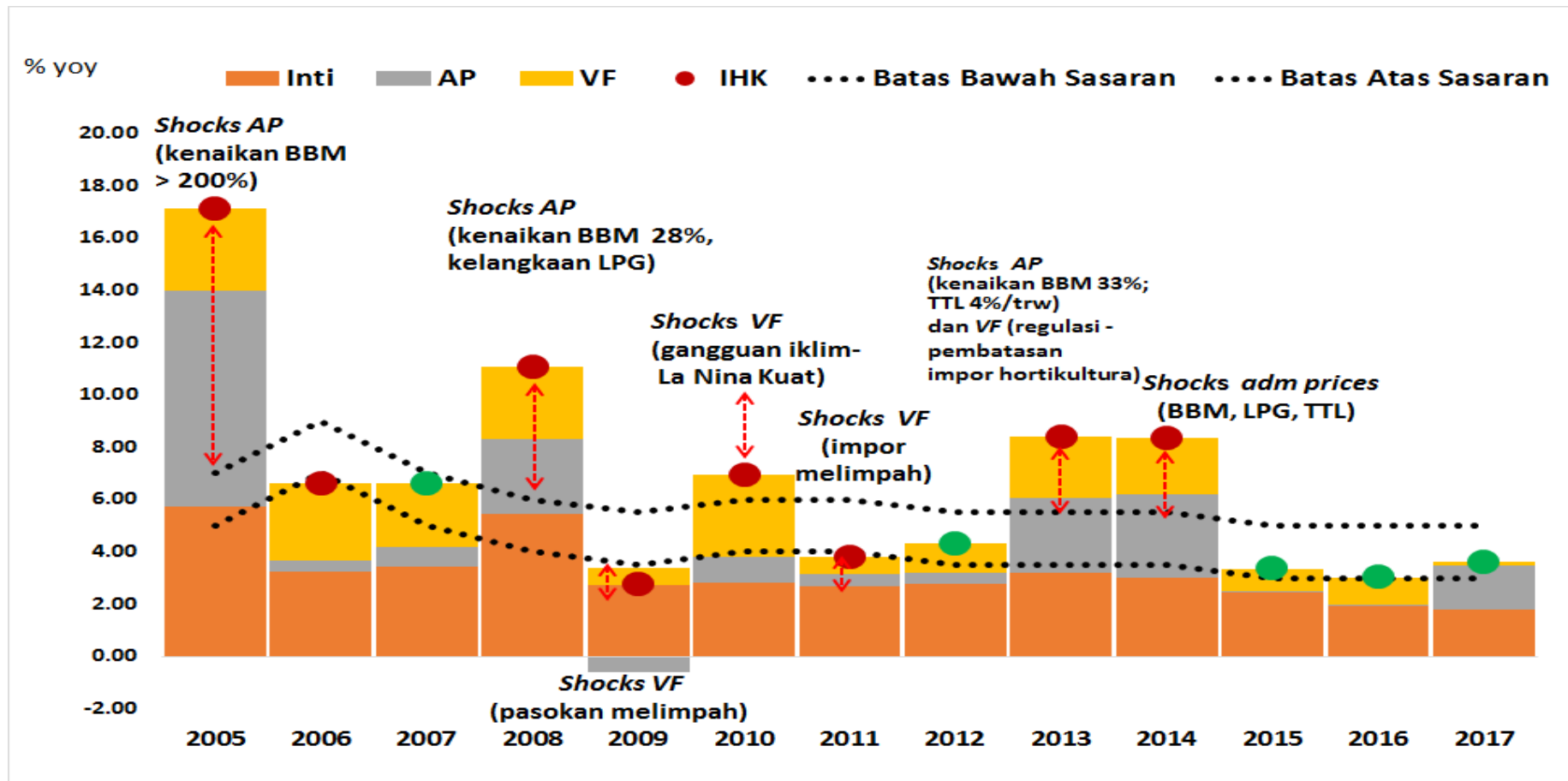


DI TENGAH SASARAN INFLASI YANG DITETAPKAN MENURUN

Sasaran inflasi ditetapkan sebesar $3,5\% \pm 1\%$ untuk 2018-2019 dan $3\% \pm 1\%$ untuk 2020-2021

- Inflasi tercapai sesuai sasarannya dalam tiga tahun terakhir. Ke depan, target inflasi ditetapkan **menurun** (*challenging*). **Pencapaian dalam 3 tahun terakhir perlu dipertahankan** untuk menjaga kredibilitas dan ekspektasi inflasi.
- Perlunya **mengintegrasikan** *Roadmap* Pengendalian Inflasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Realisasi vs Sasaran Inflasi





ARAHAN PRESIDEN RI PADA RAKORNAS PENGENDALIAN INFLASI 2018

Presiden menekankan pentingnya komitmen untuk secara bersama-sama memperbaiki neraca transaksi berjalan serta menjaga inflasi agar tetap rendah dan stabil

MEMPERCEPAT
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
UNTUK
MEWUJUDKAN
STABILITAS
HARGA DAN
PERTUMBUHAN
EKONOMI YANG
INKLUSIF SERTA
BERKUALITAS

Memperbaiki Neraca Transaksi Berjalan



Perlu dilakukan **perbaikan neraca transaksi berjalan** melalui **peningkatan investasi berorientasi ekspor** maupun substitusi impor, termasuk peningkatan ekspor jasa pariwisata

Pentingnya peran **Pemerintah Daerah** untuk ikut memperbaiki **iklim kemudahan berusaha** melalui penyederhanaan dan percepatan perizinan yang mendorong **investasi berorientasi ekspor dan substitusi impor**

Menjaga Inflasi tetap Rendah dan Stabil



Pentingnya mewujudkan **ketersediaan pasokan** dan kelancaran distribusi

Pentingnya upaya untuk mendorong **perdagangan antardaerah**, termasuk mendorong pembangunan pasar-pasar pengumpul di berbagai daerah untuk mengurangi biaya transportasi perdagangan antardaerah

Pentingnya peran Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap **menjaga berjalannya mekanisme pasar** dalam mencegah terjadinya penimbunan barang yang berlebihan

Koordinasi Kebijakan Perbaikan
Neraca Transaksi Berjalan

Roadmap Pengendalian Inflasi
2019-2021

EVALUASI ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2015-2018



CAPAIAN ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2015-2018

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2015 - 2018

“Mencapai Sasaran Inflasi 2015-2018”



IHK

2015 - 2018

**4,0%±1%; 4,0%±1%; 4,0%±1%;
3,5%±1%**

CAPAIAN *ROADMAP* PENGENDALIAN INFLASI 2015 - 2018

- Inflasi Ihk 2015-2018 dalam kisaran sasaran (3,35%; 3,02%; 3,61%; 3,5%* (yoy))
- Inflasi VF Ramadhan 2015-2018 menurun (1,74%; 1,71%; 0,91%; 0,19% (mtm))

Inflasi Inti

- PDB aktual terjaga di sekitar PDB potensial
- Ekspektasi inflasi menurun dan terjangkau di sekitar sasaran inflasi

Inflasi VF

- Peningkatan kelembagaan petani
- Peningkatan PDB hortikultura
- Penguatan upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen
- Peningkatan akses informasi pangan kepada petani
- Antisipasi dampak El Nino

Inflasi AP

- Kenaikan konsumsi BBK
- Pengaturan kelebihan dan/atau penerimaan Pertamina akibat perbedaan harga jual dengan keekonomian
- Kewajiban bio diesel minimal 20% sebagai campuran BBM
- Subsidi tepat sasaran TTL daya 900 VA non subsidi



EVALUASI ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2015-2018

Realisasi inflasi IHK pada 2015-2018 lebih rendah dari proyeksi pada roadmap pengendalian inflasi 2015-2018.



INFLASI INTI



TANTANGAN

- Output Gap menyempit
- Volatilitas nilai tukar meningkat
- Akurasi statistik (antara lain tarif pulsa ponsel)

CAPAIAN ROADMAP

- Menjaga PDB Aktual di sekitar PDB Potensial:
 - Pengelolaan permintaan
 - Pembangunan infrastruktur konektivitas
- Mengelola ekspektasi inflasi → menurun & di sekitar sasaran inflasi

DAMPAK

Ekspektasi inflasi terjangkau pada sasaran inflas

Output gap menyempit

Volatilitas nilai tukar rentan oleh kondisi global



Roadmap pengendalian inflasi inti telah terlaksana yang mendukung terjaganya inflasi inti di level yang rendah



INFLASI VF



TANTANGAN

- PDB tanaman pangan melambat
- Rata-rata historis inflasi VF 2015-2017 di atas arahan HLM 4-5%
- Faktor siklikal beberapa komoditas pangan strategis masih kuat
- Akurasi data pangan
- Kebijakan harga & pasokan yg sulit dipenuhi pedagang

CAPAIAN ROADMAP

- Peningkatan kelembagaan petani
- Peningkatan PDB hortikultura
- Penguatan upaya stabilisasi harga di tingkat konsumen
- Peningkatan akses informasi pangan kepada petani
- Antisipasi dampak El Nino 2015 dan 2018

DAMPAK

Inflasi VF masih diwarnai pola siklikal yang kuat



Roadmap terkait peningkatan produksi telah dilakukan, namun roadmap ketersediaan pasokan & keterjangkauan harga perlu mendapat perhatian



INFLASI AP



TANTANGAN

- Peningkatan efisiensi produksi
- Reformasi subsidi energi
- Pengendalian konsumsi BBM melalui pemanfaatan BGG dan BBN
- Akurasi statistik (antara lain tarif angkutan udara)

CAPAIAN ROADMAP

- Pengelolaan permintaan BBM
- Pemerintah dapat menetapkan distribusi & menetapkan harga jual BBM berbeda dari formula
- Kewajiban pemanfaatan bio diesel minimal 20% sebagai campuran BBM
- Pelaksanaan subsidi tepat sasaran TTL daya 900 VA non subsidi

DAMPAK

Inflasi IHK relatif stabil di tengah tren peningkatan harga minyak dunia

Menurunnya kondisi keuangan BUMN energi (Pertamina dan PLN) yang dapat mempengaruhi rencana investasi dan rating surat hutang.



Roadmap Pengendalian Inflasi AP belum optimal yang menimbulkan risiko shock inflasi yang cukup besar di tahun-tahun mendatang.



IHK

2015 - 2018 (SASARAN)

4,0%±1%; 4,0%±1%; 4,0%±1%; 3,5%±1%

2015 - 2018 (REALISASI)

3,35%; 3,02%; 3,61%; 2,88%*



INTI

2015 - 2018 (SASARAN)

4,3%±1%; 4,3%±1%; 4,3%±1%; 3,5%±1%

2015 - 2018 (REALISASI)

3,95%; 3,07%; 2,95%; 2,82%*



VF

2015 - 2018 (SASARAN)

4,1%±1%; 4,1%±1%; 4,1%±1%; 4,0%±1%

2015 - 2018 (REALISASI)

4,84%; 5,92%; 0,71%; 3,75%*



AP

2015 - 2018 (SASARAN)

3,0%±1%; 3,0%±1%; 3,0%±1%; 3,0%±1%

2015 - 2018 (REALISASI)

0,39%; 0,21%; 8,70%; 2,40%*

ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021



ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI 2019-2021

SASARAN INFLASI



IHK

2019	2020	2021
3,5%±1%	3,0%±1%	3,0%±1%



INTI

2019	2020	2021
3,5%±1%	3,0%±1%	3,0%±1%



VF

2019	2020	2021
4,0%±1%	3,25%±1%	3,25%±1%



AP

2019	2020	2021
3,0%±1%	2,75%±1%	2,75%±1%

2019

2020-2021

GAP

- Rata-rata inflasi VF 3 tahun terakhir 5,58% (yoy), di atas arahan HLM TPIP 2017-2018 (4%-5%).
- Faktor musiman beberapa komoditas pangan strategis masih kuat.
- Inflasi domestik dan beberapa harga pangan domestik lebih tinggi dari negara sekitar.
- Masih terdapat disparitas harga/inflasi yang cukup besar antar provinsi.

POLICY DIRECTION

Mencapai IHK 3,5%±1%

- Menjaga inflasi inti
- Menjaga stabilitas inflasi VF pada kisaran: 4-5%
- Kebijakan inflasi AP memperhatikan sasaran inflasi IHK dan kesejahteraan/daya beli masyarakat

GAP

- Keberlanjutan kebijakan harga energi domestik dihadapkan pada dampak inflasi AP dan daya beli masyarakat.
- Ekspansi siklus ekonomi yang perlu disesuaikan dengan output potensialnya dan keterbatasan likuiditas global.
- Volatilitas nilai tukar diperkirakan tetap tinggi.

POLICY DIRECTION

Mencapai IHK 3,0%±1%

- Menjaga inflasi inti
- Menjaga inflasi VF tidak lebih dari 4%
- Kebijakan inflasi AP memperhatikan sasaran inflasi IHK dan kesejahteraan/daya beli masyarakat



PROGRAM STRATEGIS & SUB PROGRAM STRATEGIS

4K

ANALYSIS

PROGRAM STRATEGIS

SUB PROGRAM STRATEGIS



KETERJANGKAUAN HARGA

Penurunan rata-rata inflasi dan volatilitas inflasi 10 komoditas pangan strategis* berturut-turut dlm 2 tahun terakhir

Stabilisasi Harga

Mengelola Permintaan

- Sinkronisasi Anggaran Pusat-Daerah
- Nilai Tukar
- Operasi Pasar/Pasar Murah
- Output Gap
- Konsumsi



KETERSEDIAAN PASOKAN

Rendemen beras > 63%. Tersedianya CPP, khusus beras menuju 1-1,5 juta ton.

Memperkuat Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan

Memperkuat Kelembagaan

- Produktivitas
- Cadangan Pangan Pemerintah
- Kebijakan Impor
- Sistem Resi Gudang
- Kredit Usaha Rakyat
- Kartu Tani
- Asuransi pertanian
- Gapoktan



KELANCARAN DISTRIBUSI

Penurunan disparitas harga* antara provinsi dengan rata-rata nasional (termasuk antar waktu).

Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah

Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan

- Model Bisnis & *Pilot Project*
- *Digital Farming*
- Pasar Induk Beras



KOMUNIKASI EFEKTIF

- Ekspektasi inflasi terjangkau dalam sasaran inflasi
- Korelasi inflasi* data PIHPS dengan data BPS minimal 0,8 dalam 1 tahun terakhir.
- Tingkat kehandalan TPID dalam pencapaian inflasi daerah (median >50).

Memperbaiki Kualitas Data

Memperkuat Koordinasi Pusat dan Daerah

- *One Map Policy*
- Statistik Inflasi Produksi & Stok
- Rekomendasi Kebijakan
- *Capacity Building*
- PIHPS

*) Beras, Daging Sapi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Minyak Goreng, Gula Pasir (indikator dalam PIHPS).



TIMELINE PENYUSUNAN ROADMAP PENGENDALIAN INFLASI

Buku Roadmap Pengendalian Inflasi Pusat direncanakan launching pada bulan Desember 2018



Pembahasan
Roadmap
Pengendalian
Inflasi Pusat
Level Eselon I
31 Jul 2018

Pembahasan
Roadmap
Pengendalian
Inflasi Pusat
dalam HLM TPIP
27 Ags 2018

Diseminasi
Roadmap
Pengendalian
Inflasi Pusat
dalam
Rakorpusda
TPID
Okt 2018

Penyusunan
Roadmap
Pengendalian
Inflasi Daerah
oleh TPID
Okt-Des 2018

Penandatanganan
Buku *Roadmap*
Pengendalian
Inflasi Pusat oleh
Ketua TPIP dan
Pencetakan
Des 2018

Menko Perekonomian menyampaikan secara resmi *Roadmap* kepada Kepala Bappenas, Kemenkeu dan Kemendagri sebagai acuan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan (pusat dan daerah)
Des 2018



KETERJANGKAUAN HARGA

KEY STRATEGIES

4K

PROGRAM

SUB PROGRAM 2018 - 2019

Timeline Target

2018-2019

2020-2021

Keterangan

1

Keterjang-
kauan Harga

Stabilisasi
Harga

- Menerbitkan Permen PPN/Bappenas sebagai juknis dari PP no 17 tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional terkait stabilisasi harga
 - Sinkronisasi program antar K/L dengan Pemerintah Daerah dan antar daerah terkait substansi pengendalian inflasi (atau kestabilan harga barang dan jasa melalui forum Rakortek RKP-RKPD)
 - Pemanfaatan aplikasi e-monev Bappenas dalam rangka memastikan realisasi program K/L yang mendukung pengendalian inflasi di pusat dan daerah
- Optimalisasi Pasar Murah/Operasi Pasar 10 komoditas bahan makanan pangan strategis, dengan memperhatikan permintaan antar waktu dan daerah
 - Reformulasi Operasi Pasar menjadi KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga).
- Menjaga volatilitas nilai tukar melalui pengembangan instrumen derivatif suku bunga dan nilai tukar untuk mendukung pelaksanaan lindung nilai, termasuk infrastruktur pasar keuangan.

▪ Juknis PP 17 TH 2017 dalam bentuk Permen PPN/Bappenas

▪ Beras, Daging Sapi, Bawang Merah

▪ Volatilitas nilai tukar

▪ Komoditas lainnya

▪ Volatilitas nilai tukar

▪ Bappenas

▪ Kemendag
▪ Bulog

▪ BI
▪ Kemenkeu

Mengelola
Permintaan

- Menjaga keseimbangan internal perekonomian
 - Implementasi Kebijakan Moneter
- Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan melalui pemanfaatan program di Desa, Kelurahan, Puskesmas, dan Sekolah.

▪ PDB Aktual di sekitar PDB Potensial

▪ Konsumsi beras per kapita menurun

▪ PDB Aktual di sekitar PDB Potensial

▪ Konsumsi beras per kapita menurun

▪ BI

▪ Kementan



KETERSEDIAAN PASOKAN (1)

KEY STRATEGIES 4K

PROGRAM

SUB PROGRAM

Timeline Target

2018-2019

2020-2021

Keterangan

2

Ketersediaan Pasokan

Memperkuat
produksi,
Cadangan
Pangan
Pemerintah,
dan
Pengelolaan
Impor-ekspor
pangan

- Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal)
 - Optimalisasi bantuan sarana produksi (benih, pupuk dan alsintan) yang didukung oleh Pembangunan Unit Pengembangan Jasa Alsintan (UPJA) di daerah sentra produksi oleh Pemda.
 - Perbaiki sistem budidaya (kalender tanam)
 - Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi
 - Peningkatan investasi untuk ternak sapi
- Mempercepat pemanfaatan PMN Bulog untuk infrastruktur pasca panen
- Percepatan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pembebasan lahan oleh Pemerintah daerah.
- Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah
 - Menjaga level CBP dan mendukung penguatan mekanisme peningkatan CBP ke level 1-1,5 juta ton.
 - Penguatan cadangan pangan pokok tertentu lainnya selain beras antara lain melalui optimalisasi penggunaan dana Cadangan Stabilisasi Harga Pangan
- Penguatan pengelolaan Impor-ekspor
 - Meneruskan mekanisme perumusan kebijakan impor-ekspor pangan melalui Rakortas Perekonomian dan penetapannya di sidang kabinet

- Mekanisasi *on farm* dan *off farm*
- Padi, Bawang, Cabai
- > 56 m3/kapita
- Revisi PP No. 18/2015
- Untuk kedelai, beras dan jagung
- % Irigasi Rusak < 46%
- Menjaga level CBP
- Kajian utk menghitung jumlah CPP Jagung, Kedelai, Gula, Dg Sapi

- Mekanisasi *on farm* dan *off farm*
- Padi, Bawang, Cabai
- > 56 m3/kapita
- Peningkatan investasi PMA/PMDN
- Untuk beras
- % Irigasi Rusak < 46%
- Level CBP mencapai 1-1,5 juta ton
- CPP Jagung, Kedelai, Gula, Dg Sapi telah tersedia

- Kementan
- Kementan
- KemenPUPR
- Kementan
- Bulog
- KemenPUPR
- Kementan
- Kemendag
- Kemenkeu
- Bulog

Impor tepat jumlah dan tepat waktu

- Kemendag



KETERSEDIAAN PASOKAN (2)

KEY STRATEGIES 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	Timeline Target		Keterangan	
			2018-2019	2020-2021		
2	Ketersediaan Pasokan	Memperkuat Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyesuaian ketentuan Asuransi Pertanian ▪ Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Resi Gudang ▪ Penyesuaian ketentuan KUR Pertanian utk inf. pasca panen (a.l. dapat dikaitkan dengan Sistem Resi Gudang) ▪ Perluasan implementasi Kartu Tani ▪ Mendorong transisi kelembagaan petani menjadi lembaga ekonomi petani a.l melalui <i>contract farming</i> ▪ Memperkuat pasokan bahan bakar dengan non BBM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beras, Daging Sapi ▪ Beras ▪ Beras ▪ Wilayah Jawa ▪ Peningkatan jumlah lembaga ekonomi petani (beras, bawang merah, cabai) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beras, Daging Sapi, Bawang Merah, Cabai, Jagung ▪ Komoditas lainnya ▪ Komoditas lainnya ▪ 5 provinsi luar Jawa** ▪ Akses pembiayaan/pasar bagi lembaga ekonomi petani komoditas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementan • Kemenkeu • Kemenko Eko. • Kemenko Eko. • Kementan • Kemenkeu • Kemendagri
				Menjaga porsi bio diesel dalam campuran BBM min. 20%	<ul style="list-style-type: none"> • KemenESDM • KemenIndustri 	



KELANCARAN DISTRIBUSI DAN KOMUNIKASI EFEKTIF

KEY STRATEGIES 4K	PROGRAM	SUB PROGRAM	Timeline Target		Keterangan
			2018-2019	2020-2021	
3	Kelancaran Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan model bisnis kerja sama perdagangan antar daerah dan fasilitasi kerja sama antar daerah, a.l. dengan mengoptimalkan peran swasta dan BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya <i>business model</i> berdasarkan komoditas atau daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi <i>pilot project</i> berdasarkan komoditas atau daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Kemendagri BI Kemenko Ek.
		<ul style="list-style-type: none"> Membentuk innovation lab antara lain <i>digital business incubator</i>, <i>fintech village</i> dan mendorong fasilitasi dan <i>advisory UMKM</i> untuk memanfaatkan <i>platform digital farming</i> Pembangunan pasar induk beras dan sarana konektivitasnya di sentra produksi di Jawa dan Luar Jawa (perlu kajian lebih lanjut) 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi roadmap <i>e-commerce</i> Sulsel (Pare-Pare), Jatim, Jateng, Jabar, Sumsel, Lampung, dan NTB 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah <i>platform digital</i> pangan Kalimantan, Papua, dan daerah timur lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> BI Kem.kominfo OJK KemenPUPR Bulog
4	Komunikasi Efektif	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan satu peta lahan pertanian Peningkatan korelasi data PIHPS dan BPS Penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan pedagang besar, termasuk data stok Perbaikan kualitas statistik inflasi pangan dan barang strategis lainnya termasuk data produksi dan stok 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia untuk padi 5 komoditas berkorelasi min 0,8 dengan inflasi BPS Tersedia data di ps. tradisional s.d pedagang besar Inflasi beras, pulsa ponsel, angkutan udara 	<ul style="list-style-type: none"> Tersedia untuk komoditas lain* 10 komoditas berkorelasi min 0,8 dengan inflasi BPS Tersedia data di ps. tradisional s.d produsen di seluruh provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> BPS BI BI BPS
		<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan AP yang sesuai dengan sasaran inflasi IHK (antara lain review kebijakan batas atas batas bawah tarif angkutan udara) Melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID 	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan AP Tingkat kehandalan meningkat menjadi 40 (median) 	<ul style="list-style-type: none"> Rekomendasi Kebijakan AP Tingkat kehandalan meningkat menjadi 50 (median) 	<ul style="list-style-type: none"> Kemenhub Kemen ESDM Kemendagri Kemenko Eko. BI

HARAPAN



HARAPAN KEPADA TPID

1. Roadmap pengendalian inflasi menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana halnya RKPD. Salah satu opsi, Pemda didorong menetapkan roadmap pengendalian inflasi dalam bentuk produk hukum. Hal ini juga untuk menyikapi dinamika rotasi personel di Pemda dan resistensi dari DPRD serta Bappeda.
2. Sebagaimana roadmap nasional, roadmap tingkat daerah diharapkan melibatkan secara aktif program yang ada di dinas-dinas terkait sehingga tidak bertentangan dengan program pengendalian inflasi. Diskusi dengan dinas terkait seyogyanya dilakukan dua arah, dalam artian substansi atau program kerja yang masih perlu diprogramkan di dinas diupayakan juga dimasukkan kedalam roadmap.
3. Timeline yang cukup, mengingat roadmap untuk 2019-2021 (sisa 2 bulan).
4. Menjadikan substansi dalam roadmap pengendalian inflasi sebagai bagian dari pertanggungjawaban tahunan pada HLM pada masing-masing daerah.
5. Memastikan bahwa kerjasama antardaerah yang dilakukan sudah dimasukkan dalam roadmap kedua daerah tersebut.



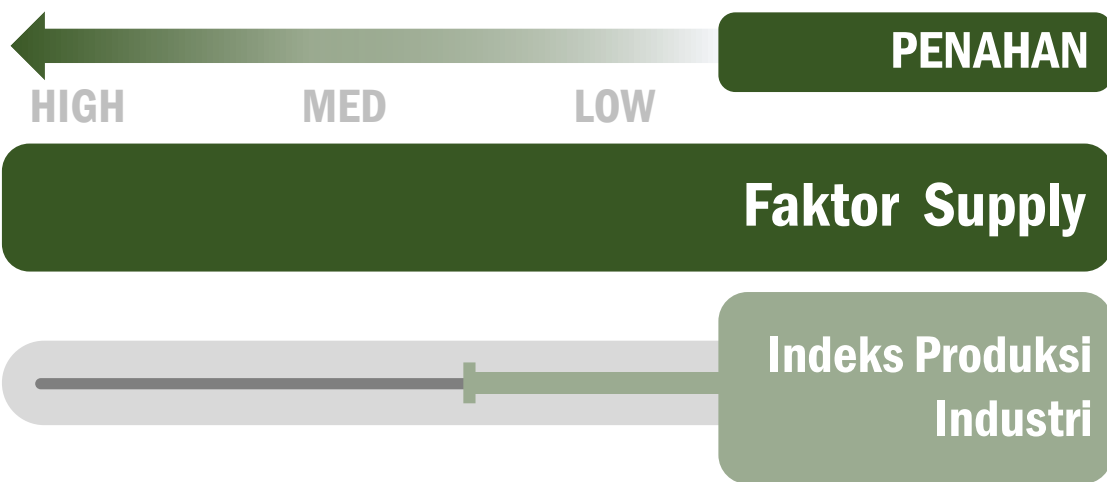
**Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia**

TERIMA KASIH



DETERMINAN INFLASI INTI

DETERMINAN INFLASI INTI



PENDORONG

LOW MED HIGH

Shock

Harga BBM

Faktor Global

Harga Emas Dunia

Kurs

Faktor *Idiosyncratic*

Tahun Ajaran Baru

Faktor Permintaan (Long Run)

Uang Beredar/PDB

PENDORONG

LOW MED HIGH

Ekspektasi

Backward Expectation



DETERMINAN INFLASI VOLATILE FOOD

